

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era perkembangan informasi dan teknologi saat ini, penerapan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah dan juga langkah pemerintah untuk mencegah risiko terjadinya penyalahgunaan keuangan di pemerintah daerah.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur berjalan dengan transaksi belanja yang menggunakan sistem tunai, dan dengan kemajuan zaman perkembangan sistem pembayaran berinovasi dengan beragam bentuk kecanggihan yang muncul. Dari tahun ke tahun dampak dari kemajuan teknologi informasi, seiring dengan kemajuan digitalisasi jasa keuangan dan instrument-instrumen transaksi pembayaran.

Inovasi sistem pembayaran pada awalnya adalah sistem manual/ konvensional dan harus membawa fisik uang, kemudian berinovasi menjadi sistem pembayaran dengan instrumen non-tunai dengan memakai alat pembayaran menggunakan kartu seperti kartu ATM atau Debet dan kartu kredit. Sampai pada tahun 2018 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menggunakan tunai untuk transaksinya. Dengan berjalannya waktu dari tahun ke tahun, tepatnya pada tahun 2019 Pemerintah Pusat menganjurkan untuk perubahan sistem transaksinya dengan menggunakan sistem transaksi non-tunai.

Perkembangan teknologi informasi yang diikuti dengan tingkat persaingan bank yang semakin tinggi mendorong sektor perbankan atau non bank untuk semakin inovatif dalam menyediakan berbagai alternatif jasa pembayaran non tunai berupa sistem transfer dan alat pembayaran menggunakan kartu elektronik (pembayaran kartu elektronik) yang aman, cepat dan efisien, serta bersifat global (Santomero dan Seater, 1996)

Menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi tujuan program pemerintah, di era perkembangan informasi dan teknologi saat ini, penerapan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah dan juga langkah pemerintah untuk mencegah risiko terjadinya penyalahgunaan keuangan di pemerintah daerah, selain itu sistem transaksi non-tunai dianggap lebih praktis, efisien, mudah bahkan dapat mendukung perekonomian melalui peningkatan kecepatan peredaran uang.

Sistem transaksi yang bermula dengan sistem transaksi tunai hingga berubah menjadi sistem transaksi secara non-tunai, sistem yang semula menggunakan tunai lalu berubah menjadi non-tunai, selain memiliki banyak keuntungan, tetapi juga proses pelaksanaannya memiliki beberapa kendala yaitu dalam proses administrasi.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, pokok yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah “Bagaimana transaksi dari tunai yang beralih ke non-tunai”.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transaksi dari tunai yang beralih ke non-tunai di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

2. Manfaat

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan seputar transaksi non-tunai sehingga dapat mengkombinasikan teori yang sudah diperoleh di bangku kuliah dengan kondisi yang sebenarnya pada suatu perusahaan.

b. Bagi perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi salah satu manfaat bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja dan tingkat ketelitian, sehingga penulisan ini dapat membawa dampak positif bagi perusahaan dan karyawan.

c. Bagi Politeknik NSC Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, wawasan serta ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan, terutama dalam hal pembuatan Pencatatan Transaksi Non-Tunai.